

## REFERENCES

- Adiguna, D. M. (2019). *Analisis Dampak Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem Laut Di Indonesia*. Yogyakarta: Researchgate.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1*, 3-4.
- BPS. (2018). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Natuna Dalam Angka Tahun 2019*. Ranai: Badan Pusat Statistik Natuna.
- BPS. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cherman. (2019, Oktober 7). *SKPT Natuna Resmi Beroperasi*. Retrieved from Antaranews.com: <https://kepri.antaranews.com/berita/59378/skpt-natuna-resmi-beroperasi>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Third Edition)*. California: Sage.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. (2018). *Laporan Kepesertaan Asuransi Nelayan Tahun 2016 - 2018*. Natuna: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- Dispenduk Capil Kab. Natuna. (2019). *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Semester I*. Ranai: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- EdwardIII, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

- Faqir, A. A. (2019, Desember 4). *Menteri Edhy Janji Tak Ganti Penjabat Eselon I Era Susi Pudjiastuti*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4126165/menteri-edhy-janji-tak-ganti-penjabat-eselon-i-era-susi-pudjiastuti>
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Etika Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan . (2017). *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018, Juli 25). *DJPT Lakukan Uji Coba Penggunaan Kartu KUSUKA di Natuna*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/djpt/artikel/5428-djpt-lakukan-uji-coba-penggunaan-kartu-kusuka-di-natuna>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). *Laporan Kinerja KKP Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). *Perkembangan Pembangunan Industri Perikanan Berbasis SKPT dengan Tol Laut*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020, Januari 8). *Melalui SKPT Natuna, Pemerintah Komitmen Perkuat Perekonomian dan Kedaulatan di Wilayah Perbatasan*. Retrieved from [kkp.go.id: kkp.go.id/Natuna/artikel/16233-melalui-skpt-natuna-pemerintah-komitmen-perkuat-perekonomian-dan-kedaulatan-di-wilayah-perbatasan](http://kkp.go.id/Natuna/artikel/16233-melalui-skpt-natuna-pemerintah-komitmen-perkuat-perekonomian-dan-kedaulatan-di-wilayah-perbatasan)
- Kerans, A. H. (2019). *Kinerja Kebijakan Strategis Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Flores Timur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Kuncoro, H. S. (2016). *Studi Implementasi Kebijakan Pengawasan Perikanan*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Mamoribo, M. (2011). *Dinamika Usaha Masyarakat Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kampung Sarawandori Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua*. Yogyakarta: Fisipol, UGM.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta .
- Nazir, M. (1985). *Metode Penelitian : Cetakan Ke-I*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noviyanti, R., Wisudo, S. H., Wiyono, E. S., Baskoro, M. S., & Hascaryo, B. (2015). Capacity Building of Fishers in the Sustainable Fishery Development in PPN Pelabuhan Ratu. *Jurnal Sosek KP Vo. 10 No. 2*, 252.
- Parsons, W. (2006). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Perikanan Nusantara. (2016, Maret 31). *Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Retrieved from [perikanannusantara.co.id: http://perikanannusantara.co.id/detailpost/potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia](http://perikanannusantara.co.id/detailpost/potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia)
- Permana, Y. G. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Samin di Kabupaten Blora*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Permen KKP No. 48 . (2015). *Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Perum Perindo. (2018). -. Natuna: Perum Perindo.
- Pintér, L., Swanson, D., & Barr, J. E. (2006). *Use of Indicators in Policy Analysis : Annotated Training Module Prepared for the World Bank Institute*. World Bank Institudes.
- Prasetya, R. A. (2016, Juni 24). *Inilah Potensi Tersembunyi di Balik Wilayah Laut Natuna*. Retrieved from GoodNews From Indonesia:

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/06/24/inilah-potensi-tersembunyi-di-balik-wilayah-laut-natuna>

- Prasetyo, J. (2018). *Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Terhadap Jarak Tempat Tinggal dan Biaya Transportasi Pelajar SMA di DIY*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM.
- Pregiwati, L. A. (2018, Januari 29). *Tahun 2019 KKP Bangun 20 SKPT di Seluruh Wilayah Indonesia*. Retrieved from KKPNews: <https://kkp.go.id/SKPT/artikel/6001-tahun-2019-kkp-bangun-20-skpt-di-seluruh-wilayah-indonesia>
- Pujiyati, S. (2001). *Pembangunan Perikanan Laut di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, N. (2012). *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putra, D. A. (2019, Oktober 7). *Resmikan SKPT, Menteri Susi Ingin Natuna Jadi Garda Terdepan Indonesia*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/resmikan-skpt-menteri-susi-ingin-natuna-jadi-garda-terdepan-indonesia.html>
- Rachman, N. A. (2014). Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. *JKAP*, 149-150.
- Rahmantya, K. F. (2016). *Potensi Kelautan dan Perikanan Natuna*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Rosha, F. R. (2014). *Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pukat Layang Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai abu Kabupaten Deli Serdang*. Yogyakarta: Fakultas Pertanian, UGM.
- Rossi, P. H., Freeman, H. E., & Lipsey, M. W. (1999). *Evaluation : A Systematic Approach Sixth Edition*. California: SAGE Publications.
- Santoso, B. (2020, Januari 6). *Heboh Coast Guard China Masuk Perairan Natuna, Ini Penjelasan Guru Besar UI*. Retrieved from suara.com:

<https://www.suara.com/news/2020/01/06/064939/heboh-coast-guard-china-masuk-perairan-natuna-ini-penjelasan-guru-besar-ui>

- Sawitri, A. A. (2017, Agustus 7). *KKP Targetkan SKPT Natuna Serap 24 Ribu Ton Ikan Per Tahun*. Retrieved from Tempo: <https://bisnis.tempo.co/read/897654/kkp-targetkan-skpt-natuna-serap-24-ribu-ton-ikan-per-tahun>
- Setyawati, S. L. (2014). *Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)*. Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas.
- Simanullang, E. D. (2012). *Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru Sekolah Dasar di Kota Sibolga*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik, UGM.
- SKPT Natuna. (2020). *Perkembangan Operasional Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Kab. Natuna Prov. Kepri*. Natuna: PPSL / SKPT Natuna.
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi Cetakan VI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2010). *Handbook of Practical Program Evaluation*. San Fransisco: Jossey-Bass .
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wijaya, S. (1994). *Kebijakan Publik dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Zakaria, A. (2009). *Analisis Tingkat Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan Nelayan di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan*. Yogyakarta: Fakultas Pertanian, UGM.
- Zulham, A. (2018). Penilaian Sosial Dalam Membangun Entitas Bisnis Perikanan Pada SKPT Selat Lampa, Natuna. *Kebijakan Osial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 77.

Peraturan Perundang-Undangan :

A. Undang – Undang :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/Permen-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan.
6. Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penumbuhkembangan Kelompok.

C. Keputusan Menteri :

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/Kepmen-KP/2016 tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.

2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan SKPT di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/Kepmen-KP/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 51/Kepmen-KP/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Kepmen-KP/2017 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 167/MEN-SJ/KP.441/VI/2017 tentang Pemberian Tugas dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
5. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 16/Kep-DJPT/2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Pelabuhan Perintis.

**D. Peraturan Daerah / Keputusan Bupati:**

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
2. Keputusan Bupati Natuna nomor 213 Tahun 2019 tentang Tim Kerja Pembangunan Pasar Ikan Ranai Bantuan Hibah Pemerintah Jepang di Lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.